

**PERSEPSI GURU TERHADAP FUNGSI KOMITE SEKOLAH
DI SMPN GUNUNG KERINCI SE-KECAMATAN SIULAK
KABUPATEN KERINCI**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1)*



Oleh :
OFPI DESMAN
79382/2006

**JURUSAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Persepsi Guru Terhadap Fungsi Komite Sekolah di SMPN
Gunung Kerinci Se-Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci

Nama : Ofpi Desman

BP/NIM : 2006/79382

Program Studi : Pendidikan Geografi

Jurusan : Geografi

Fakultas : Ilmu-Ilmu Sosial

Padang, Januari 2011

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Drs. Surtani, M. Pd

Pembimbing II

Triyatno, S. Pd, M. Si

Ketua Jurusan Geografi

Dr. Paus Iskarni, M.Pd
196305131989031003

HALAMAN PENGESAHAN

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Geografi
Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang**

**Persepsi Guru Terhadap Fungsi Komite Sekolah di SMPN
Gunung Kerinci Se-Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci**

**Nama : Ofpi Desman
BP/NIM : 2006/79382
Program Studi : Pendidikan Geografi
Jurusan : Geografi
Fakultas : Ilmu-Ilmu Sosial**

Padang, Januari 2011

Tim Penguji

Nama

- | | | |
|----------------------|--------------------------------|----------------|
| 1. Ketua | :Drs. Surtani, M. Pd | 1 _____ |
| 2. Sekretaris | : Triyatno, S. Pd, M.Pd | 2 _____ |
| 3. Anggota | : Dra. Ernawati, M.Si | 3 _____ |
| 4. Anggota | : Drs. Bakaruddin, M.S | 4 _____ |
| 5. Anggota | : Dra. Moh. Nasir B | 5 _____ |

ABSTRAK

Ofpi Desman : Persepsi Guru Terhadap Fungsi Komite Sekolah di SMPN Gunung Kerinci Se-Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan, mengolah, menganalisis dan membahas data tentang : (1) Persepsi guru terhadap fungsi komite sekolah untuk mempertimbangan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan di SMPN Gunung Kerinci Kecamatan Siulak. (2) Persepsi guru terhadap fungsi komite sekolah sebagai pemberi masukan, pertimbangan dan rekomendasi di SMPN Gunung Kerinci Kecamatan Siulak, (3) Persepsi guru terhadap fungsi komite sekolah untuk pengontrolan transparansi dan akuntabilitas di SMPN Gunung Kerinci Kecamatan Siulak, (4) Persepsi guru terhadap fungsi komite sekolah untuk mediator antara pemerintah dengan masyarakat di SMPN Gunung Kerinci Kecamatan Siulak.

Jenis penelitian ini tergolong Deskriptif kualitatif. Sumber data diambil adalah kata-kata dan tindakan yang berasal dari orang-orang yang mengetahui permasalahan penelitian. Subjek penelitian diambil melalui teknik *Purposif Sampling*. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Teknik analisa secara kualitatif berupa reduksi data, penyajian data dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini meliputi: **Pertama**, temuan penelitian tentang persepsi guru terhadap fungsi komite sekolah ternyata komite sekolah tidak bisa mengambil kebijaksanaan sendiri dalam mempertimbangkan pelaksanaan kebijakan di sekolah tanpa ikut campur guru, kepala sekolah dan masyarakat. **Kedua**, persepsi guru terhadap fungsi komite sekolah sebagai pemberi masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam proses pembentukan komite sekolah memang ada yang sudah sesuai harapan. Bahkan ada yang sudah menerapkan budaya manajemen dengan kreasi dan inovasi yang membanggakan, sehingga keberadaan komite sekolah benar-benar dirasakan peran dan fungsinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. **Ketiga**, tentang persepsi guru terhadap fungsi komite sekolah sebagai pengontrolan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan komite sekolah SMPN Gunung Kerinci Kecamatan Siulak ternyata dilakukan sesuai dengan prinsip yang berlaku, yakni harus transparansi, akuntabel, dan demokratis, serta komposisi pengurusan dan anggota harus mencakup semua unsur. **Keempat**, persepsi guru terhadap fungsi komite sekolah sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat dalam pembentukan komite Sekolah SMPN Gunung Kerinci Kecamatan Siulak dilakukan melalui musyawarah mufakat yang diikuti oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat Kecamatan Siulak. Perubahan nama BP3 menjadi komite sekolah, khususnya di SMPN Gunung Kerinci tentu mempunyai peran tersendiri. Perubahan nama BP3 menjadi komite Sekolah adalah sebagai bentuk upaya pemerintah dalam melibatkan masyarakat sekitar dalam dunia pendidikan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kemudahan–kemudahan dan jalan keluar dari segala kesulitan sehingga penyusunan skripsi dengan judul : **“Persepsi Guru Terhadap Fungsi Komite Sekolah di SMPN Gunung Kerinci Se-Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci”** dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang setia.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar sarjana pendidikan pada jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu- Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, arahan dari berbagai pihak, untuk kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Surtani, M.Pd selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini,
2. Bapak Triyatno, S.Pd, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini,
3. Bapak Ketua Jurusan dan ibu staf pengajar serta tata usaha di jurusan Geografi,

4. Bapak Dekan dan staf tata usaha Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial yang telah memberikan rekomendasi penelitian,
5. Bapak Diknas c.q Kesbang dan Linmas Kabupaten Kerinci yang telah memberi izin penelitian,
6. Bapak Kepala sekolah dan staf TU SMPN Gunung Kerinci Kecamatan sekolah yang telah memberikan bantuan data dan izin penelitian,
7. Semua responden yang ikut terlibat dalam penelitian yang telah meluangkan waktu untuk wawancara,
8. Kedua orang tua yang sangat saya penulis sayangi Ayahnda Usman Dani dan Ibunda Muslina yang selalu menyertai penulis dengan do'a dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini,
9. Teman-teman angkatan 2006, khususnya untuk NR 2006 yang telah memberikan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan untuk itu penulis bersedia menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun demi menyempurnakan skripsi ini. Semoga bantuan dan bimbingan yang diberikan akan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Terakhir penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya.

Padang, Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

ABSRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Persepsi	8
B. Komite Sekolah	11
C. Peran atau Fungsi Komite	16
D. Kerangka Konseptual	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Setting Penelitian	21
C. Subjek Penelitian.....	21
D. Variabel dan Data.....	22
E. Tahap Penelitian.....	23
F. Instrumentasi	24
G. Teknik Analisa Data.....	26
H. Teknik Penjamin Keabsahan Data	27

BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian	30
--	----

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Khusus Penelitian.....	39
B. Pembahasan.....	43

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	46
B. Saran-saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA	49
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Guru SMPN Gunung Kerinci	32
2. Data Siswa SMPN Gunung Kerinci.....	33
3. Keadaan Gedung SMPN Gunung Kerinci	34
4. Keadaan Alat Belajar SMPN Gunung Kerinci.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	18
2. Struktur Pengurus SMPN Gunung Kerinci	36
3. Struktur Pengurus Komite Sekolah.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Denah SMPN
2. Pedoman wawancara
3. Display Data Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang, Identifikasi dan Pentingnya Masalah

1. Latar Belakang

Kegagalan yang terjadi dalam usaha reformasi pendidikan bermuara pada tidak terciptanya kolaborasi yang maksimal pada satuan pendidikan, baik kepala SMPN, guru, siswa, maupun masyarakat (Mulyasa, 2003). Mencermati kondisi pendidikan tersebut, maka peran masyarakat atau pemerintah dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan mutlak dibutuhkan dan sangat penting. Salah satu terbentuknya hubungan masyarakat dengan sekolah disebut komite sekolah.

Membangun jaringan kerja sama bagi komite sekolah merupakan suatu keharusan, baik dengan pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas keluaran pendidikan. Jika jaringan kerja sama diasumsikan merupakan investasi penting bagi lembaga pendidikan, maka membangun kerjasama antara berbagai pihak yang berkepentingan merupakan hal yang penting.

Keterlibatan pihak-pihak tertentu seperti komite sekolah, kelompok lain yang mendukung dalam kegiatan belajar termasuk para guru agar dapat melakukan kerjasama yang baik, karena hal tersebut merupakan hal yang penting. Kerjasama seperti ini akan dapat mewujudkan proses belajar mengajar yang transparan dan teratur. Kenyataan yang terjadi selama ini,

komite sekolah masih dilihat sebelah mata karena fungsi dan kewenangannya masih jauh dari harapan, dan belum maksimal. Salah satu fungsi dan kewenangan komite sekolah yang jauh dari harapan adalah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait (kepala sekolah, guru, masyarakat, pemerintah) dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Keberadaan komite sekolah belum banyak dikenal oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena masih adanya paham masyarakat terhadap pola lama, di mana seluruh program selalu bersifat dari atas ke bawah tidak menghiraukan keinginan dari masyarakat sekitarnya. Sering kali terjadi kesalah pahaman bahwa pendidikan hanyalah tugas guru dan pemerintah, sedangkan masyarakat tidak pernah merasa memiliki lembaga pendidikan. masyarakat tidak pernah merasa bertanggung jawab terhadap proses belajar mengajar, padahal institusi pendidikan merupakan milik bersama, kewajiban bersama dan tanggung jawab bersama yang harus dipikul secara bersama-sama.

Dalam melaksanakan kegiatannya, maka komite sekolah seyogyanya dapat menjalankan fungsinya dengan baik agar kegiatan sekolah dapat terlaksana dengan baik. Fungsi komite sekolah tersebut meliputi : 1) Mempertimbangkan pelaksanaan kebijaksanaan, 2) penyediaan finansial, 3) Mendorong pertumbuhan dan komitmen, 4) memberi masukan, pertimbangan dan rekomendasi, 5) pengontrolan transparansi dan akuntabilitas, 6) mediator antara pemerintah dengan masyarakat. (Syamsudin, 2006).

Bertolak dari fungsi komite sekolah di atas, maka diperlukan persepsi positif dari semua pihak agar fungsi tersebut berjalan dengan baik. persepsi pada prinsipnya menyangkut pendapat, opini, atau tanggapan seseorang terhadap suatu objek dengan sempurna sangat terkait dengan pengetahuan seseorang terhadap objek tersebut, oleh sebab itu persepsi merupakan awal dari terbentuknya perilaku seseorang terhadap objek.

Guru sebagai ujung tombak dari lembaga pendidikan di sekolah, senantiasa memiliki kaitan tidak langsung dengan komite sekolah. Terlaksananya pembelajaran yang baik di sekolah sangat bergantung pada perspektif guru. Maksudnya, keberadaan komite sekolah semestinya dapat disambut dengan baik oleh guru di sekolah.

Berdasarkan observasi awal di SMPN Gunung Kerinci Kecamatan Siulak, terkesan bahwa persepsi guru terhadap keberadaan komite sekolah masih belum sesuai seperti yang diharapkan. Masalahnya masih ada guru yang menganggap komite sekolah bukan sebagai penopang pelaksanaan pembelajaran yang efektif di sekolah. Sebagian guru beranggapan bahwa komite sekolah telah berperan melebihi fungsinya di sekolah misalnya terlalu besarnya intervensi komite sekolah terhadap pembangunan, pembiayaan sekolah dan kebijaksanaan penerimaan siswa baru.

Bertolak dari permasalahan di atas, maka diperlukan kajian mendalam tentang fungsi komite sekolah yang di tuang dalam sebuah judul penelitian “ Persepsi Guru Terhadap Fungsi Komite Sekolah di SMPN Gunung Kerinci Se-Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci ”.

2. Indentifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat di indentifikasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi guru terhadap fungsi komite sekolah dalam mempertimbangkan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan di SMPN Gunung Kerinci Kecamatan Siulak,
2. Bagaimana persepsi guru terhadap fungsi komite sekolah terhadap penyediaan finansial dan pemikiran maupun tenaga dalam menyelenggarakan pendidikan di SMPN Gunung Kerinci Kecamatan Siulak,
3. Bagaimana persepsi guru terhadap fungsi komite sekolah dalam mendorong pertumbuhan dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di SMPN Gunung Kerinci Kecamatan Siulak,
4. Bagaimana persepsi guru terhadap fungsi komite sekolah dalam memberi masukan, pertimbangan dan rekomendasi di SMPN Gunung Kerinci Kecamatan Siulak,
5. Bagaimana persepsi guru terhadap fungsi komite sekolah dalam pengontrolan transparasi dan akuntabilitas di SMPN Gunung Kerinci Kecamatan Siulak,
6. Bagaimana persepsi guru terhadap fungsi komite sekolah sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat di SMPN Gunung Kerinci Kecamatan Siulak.

3. Pentingnya Masalah

Untuk mengetahui fungsi komite sekolah dalam membantu lancarnya proses pembelajaran di sekolah, oleh karena itu guru mestinya memiliki persepsi yang positif terhadap fungsi komite sekolah. Keadaan ini akan mendorong timbulnya kerja sama yang sinergi antara guru dan komite sekolah.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Untuk lebih terarah dan fokusnya penelitian, maka dalam penelitian ini dibatasi pada :

1. Variabel yang diteliti adalah persepsi guru terhadap fungsi komite sekolah berkaitan terhadap 1) kebijaksanaan pendidikan, 2) memberikan masukan dan rekomendasi, 3) pengontrolan transparansi dan akuntabilitas, 4) mediator antara pemerintah dengan masyarakat di SMPN Gunung Kerinci kecamatan Siulak.
2. Unit analisis di dalam penelitian ini adalah seluruh guru di SMPN Gunung Kerinci Kecamatan Siulak.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam Penelitian ini adalah bagaimana persepsi guru terhadap fungsi komite sekolah di SMPN Gunung Kerinci. Adapun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi guru terhadap fungsi komite sekolah dalam mempertimbangkan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan di SMPN Gunung Kerinci Kecamatan Siulak?
2. Bagaimana persepsi guru terhadap fungsi komite sekolah dalam memberi masukan, pertimbangan dan rekomendasi di SMPN Gunung Kerinci Kecamatan Siulak?
3. Bagaimana persepsi guru terhadap fungsi komite sekolah dalam pengontrolan transparansi dan akuntabilitas di SMPN Gunung Kerinci Kecamatan Siulak?
4. Bagaimana persepsi guru terhadap fungsi komite sekolah sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat di SMPN Gunung Kerinci Kecamatan Siulak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan, mengolah, menganalisis dan membahas data tentang :

1. Persepsi guru terhadap fungsi komite sekolah sebagai mempertimbangkan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan di SMPN Gunung Kerinci Kecamatan Siulak.
2. Persepsi guru terhadap fungsi komite sekolah sebagai memberi masukan, pertimbangan dan rekomendasi di SMPN Gunung Kerinci Kecamatan Siulak.

3. Persepsi guru terhadap fungsi komite sekolah sebagai pengontrolan transparansi dan akuntabilitas di SMPN Gunung Kerinci Kecamatan Siulak.
4. Persepsi guru terhadap fungsi komite sekolah sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat di SMPN Gunung Kerinci Kecamatan Siulak.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan teoritis berfungsi untuk mengembangkan konsep persepsi dan komite sekolah, khususnya dikalangan guru dan komunitas sekolah.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini di harapkan menjadi pertimbangan, bagi komite sekolah untuk membantu kemajuan sekolah,
- b. Peneliti diharapkan berguna untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana pendidikan di Jurusan Geografi FIS UNP.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia (poerwadarmita, 1992). “Persepsi diartikan sebagai opini, tanggapan atau anggapan terhadap suatu peristiwa atau kejadian”. Sedangkan Rakmat (2004) mengemukakan “Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan”. Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah merupakan suatu opini atau tanggapan seseorang terhadap pengalamannya tentang suatu peristiwa.

Selanjutnya Pringgodigdo (1997) berpendapat bahwa persepsi adalah proses mental menghasilkan bayangan pada individu sehingga dapat mengenal suatu objek atau peristiwa dengan jalan asosiasi dengan suatu ingatan tertentu, baik secara indera penglihatan, indera perasaan dan sebagainya. Dijelaskan lagi oleh Sarlito Wiraman Sarwono SW (1982) bahwa “Persepsi adalah kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan”.

Beberapa pandangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi adalah kemampuan seseorang memahami dan memberi arti kepada suatu

objek atau stimulus yang selalu menggunakan indranya dengan baik, yaitu indera pengelihatan, perasaan, pendengaran, dan lain-lain, sehingga dapat mengemukakan pendapat, tanggapan, pandangan terhadap suatu objek yang nantinya akan mempengaruhi tingkah lakunya jika berhadapan dengan lingkungan yang dialaminya. Khususnya dalam hal ini akan melihat bagaimana persepsi guru terhadap fungsi komite sekolah di SMPN Gunung Kerinci Kecamatan Siulak.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Pringgodigdo dan Hanafi (1997) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu objek yang dialaminya adalah :

Persepsi dipengaruhi oleh banyaknya pengalaman proses belajar, cakrawala, dan pengetahuan manusia mengamati suatu objek psikologi dengan kacamata sendiri diwarnai oleh nilai dan kepribadiannya, sedangkan objek psikologi dapat berupa kejadian, ide dan situasi tertentu.

Lebih lanjut Indra Wijaya, (1986) menyatakan bahwa perbedaan persepsi seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni:

- a. Faktor lingkungan, secara sempit menyangkut, masalah bunyi, warna, sinar dan secara luas menyangkut masalah ekonomi, sosial dan politik,
- b. Faktor konsepsi, yaitu pendapat dan teori seseorang Tentang manusia dengan segala tindakannya,
- c. Faktor berkaitan dengan dirinya sendiri,
- d. Faktor pengalaman masa lampau.

Senada dengan pendapat di atas, Sarwono SW (1982) mengemukakan bahwa perbedaan persepsi seseorang disebabkan oleh:

- a. Perhatian, biasanya kita tidak menangkap seluruh rangsangan yang ada di sekitar kita sekaligus, akan

- tetapi memfokuskan perhatian pada suatu atau dua objek,
- b. Set, artinya adalah harapan seseorang akan rangsangan yang akan timbul,
- c. Sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat,
- d. Ciri kepribadian seseorang.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fokus yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah fokus secara internal yaitu yang berasal dari dalam diri seseorang dan focus eksternal yaitu yang berasal dari luar diri seseorang.

3. Persepsi Guru

Persepsi guru adalah pandangan seseorang terhadap apa yang dilihat oleh guru itu sendiri. Pandangan ini adalah hasil dari interaksi antara guru dengan situasi yang melibatkan guru tersebut. Menurut Thoha (1996) persepsi adalah proses konitif yang dialami semua orang dalam memahami informasi tentang lingkungan baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan dan perasaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa, persepsi adalah tanggapan atau pandangan langsung tentang sesuatu berdasarkan pengamatan terhadap suatu objek dan pengalaman yang dihadapi sehingga timbul penafsiran informasi atau pesan dari objek tersebut, dalam penelitian ini yang menjadi objek pengamatan adalah kompetensi guru ekonomi dalam proses pembelajaran.

Guru mempunyai persepsi yang berbeda terhadap suatu objek yang diamati, sesuai dengan pendapat Surakhman (1993) yang menyatakan setiap manusia mempunyai cara pandang yang berbeda pada setiap

persoalan dengan manusia lain. Manusia hanya memperhatikan reaksi tertentu terhadap aspek hidup yang mempunyai makna tertentu baginya.

Setiap individu dalam mengamati atau memandang keadaan tertentu pada dasarnya mempunyai perbedaan yang mengakibatkan reaksi terhadap suatu objek yang sama juga berbeda.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan penilaian seseorang terhadap suatu objek, sehingga persepsi guru terhadap objek yang dilihatnya berbeda satu dengan yang lainnya. fungsi yang dimiliki Komite akan menangapinya dengan berbeda-beda. Sebagian guru mempersepsi fungsi komite sekolah yang telah berjalan dengan semestinya, dan sebagian lainnya mempersepsi fungsi komite sekolah belum berjalan dengan semestinya.

B. Komite Sekolah

Mulyasa (2003), menyatakan bahwa “Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di sekolah, yang berperan sebagai dewan yang memberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator dalam pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan di sekolah”.

Hal senada juga disampaikan oleh Sagala (2004) yang menyatakan bahwa “Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi

pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur sekolah, maupun luar sekolah”.

Kedua pendapat tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/2002 Tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dinyatakan bahwa “Komite sekolah adalah badan mandiri, yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan” (Diknas, 2001).

Di samping itu, yang menjadi dasar dibentuknya Komite Sekolah adalah:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah,
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Syamsudin, 2006).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa komite sekolah adalah sebuah badan mandiri sebagai mitra kerja kepala sekolah dan pemerintah dalam mengembangkan mutu, pemerataan, dan efisien pengelolaan pendidikan, di mana komite sekolah berperan sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan sebagai mediator masyarakat dengan sekolah.

Komite sekolah dilatar belakangi oleh gerakan reformasi di Indonesia secara umum yang menuntut prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak azasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak pada kandungan proses dan manajemen dalam sistem pendidikan.

Komite sekolah berkedudukan di satuan pendidikan sekolah, pada seluruh jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak sampai SLTA, baik itu negeri maupun swasta. Komite sekolah dibentuk berdasarkan kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan. Misalnya ada beberapa sekolah berada dalam satu lokasi atau lokasinya berdekatan membentuk satu komite sekolah, bahkan masing-masing membentuk komite sekolah atau karena pertimbangan lain dapat dibentuk koordinator komite sekolah. Komite sekolah dibentuk sesuai dengan kesepakatan sekolah dengan masyarakat dan sesuai kebutuhan.

Pembentukan Komite Sekolah juga dilatar belakangi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, penyusunan standar kompetensi lulusan yang berlaku secara nasional dan daerah, penyusunan standar kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional, penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan, dan tuntutan bagaimana supaya masyarakat lebih banyak berperan dalam membantu pelaksanaan pendidikan.

Selain itu, pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta perbedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum (Syamsudin, 2006).

Salah satu pilar pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah pemberdayaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk dapat terwujudnya peran serta masyarakat sebagaimana yang diharapkan maka pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah mencantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB XV pasal 54 dan pasal 56 yang mengatur tentang peran serta masyarakat dan dewan pendidikan dan Komite Sekolah/ Madrasah.

a. Tujuan Komite Sekolah

Komite sekolah merupakan badan dan bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintahan lainnya. Komite sekolah memiliki kemandirian masing-masing, tetapi tetap menjadi mitra kerja sekolah dan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Dibentuknya komite sekolah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan sekolah. Komite sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada

pengguna dengan berbagai kewenangan dan kemitraan yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan partisipasi masyarakat.

Adapun tujuan dibentuknya komite sekolah adalah sebagai berikut:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melakukan kebijakan operasional dan program pendidikan,
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan,
3. Menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu (Sukiani, 2006).

Dari uraian di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa keterlibatan komite sekolah dalam mendukung kegiatan belajar yang termasuk pula para guru dapat melakukan kerjasama yang baik dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut, sehingga tidak akan terjadi diskriminasi dalam sebuah lembaga pendidikan.

b. Kewenangan Komite Sekolah

Komite Sekolah dalam satuan pendidikan memiliki hubungan kemitraan dengan pemerintah. Interaksi badan ini dengan pemerintah saling melengkapi karena saling membutuhkan.

Peranan badan ini akan menciptakan kontrol atas kebijakan pemerintah, baik oleh eksekutif maupun legislatif atas dasar kewenangan dan melekat pada wadah tersebut untuk ikut serta berpartisipasi dalam pengelolaan sumberdaya, kegiatan sekolah, dan hal lain yang relevan dengan fungsi tugas masing-masing. Badan ini mempunyai batas kewenangan yaitu tidak dapat mengintervensi kebijakan pemerintah dan tidak dapat mengkerdikan arti profesionalisasi pengelolaan pendidikan tingkat satuan pendidikan (Sagala, 2004).

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa komite sekolah merupakan lembaga pengawas independen yang berada di satuan pendidikan yang tidak ada kaitannya dengan pemerintah, yang mampu bekerjasama dengan baik antara komite sekolah dengan guru dan sebaliknya mendukung kegiatan belajar.

C. Peran atau Fungsi Komite

Peran Komite sekolah adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan,
2. Pendukungan (*supporting agency*) baik yang terwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan Pendidikan,
3. Pengontrolan (*conroling agency*) dalam rangka transpiparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan,
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan (Syamsudin,2006)

Untuk menjalankan perannya Komite sekolah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu,

2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/dunia usaha dan dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu,
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat,
4. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 1. Kebijakan dan program sekolah,
 2. Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah,
 3. Kriteria kinerja satuan kependidikan,
 4. Kriteria fasilitas pendidikan.(Syamsudin,2006:)

Dari uraian di atas dapat digambarkan bahwa pembentukan komite telah diatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi pengambilan tugas orang lain. Dalam upaya membentuk sekolah dan pemerintah untuk mengelola pendidikan, maka komite sekolah memiliki tugas yang telah digambarkan dalam peran dan fungsinya.

D. Kerangka Konseptual

Keberadaan komite sekolah dapat memberi masukan terhadap perkembangan sekolah, yaitu terciptanya kesempatan masyarakat untuk menyapaikan inspirasi dan ide dalam perkembangan sekolah, selain itu komite sekolah berfungsi sebagai: 1) Mempertimbangkan pelaksanaan kebijaksanaan, 2) memberi masukan, pertimbangan dan rekomendasi, 3) pengontrolan

transparansi dan akuntabilitas, 3) mediator antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga menimbulkan persepsi guru terhadap fungsi komite sekolah.

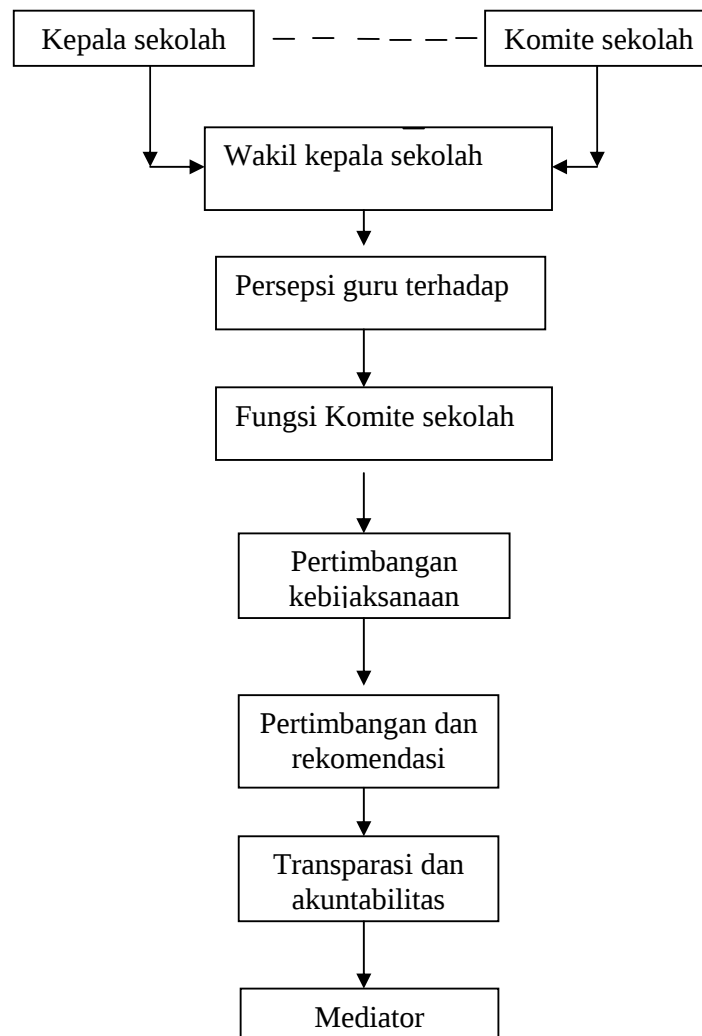
Komite sekolah berperan penting dalam mempertimbangan pelaksanaan kebijaksanaan sekolah. Peranan ini diperlukan agar kebijakan yang diambil sekolah terutama untuk perbaikan untuk pendidikan dan pembelajaran menjadi terarah. Pada sisi lain guru idealnya memiliki persepsi positif terhadap peranan komite sekolah terhadap hal yang dikmasud. Hal ini diperlukan agar peranan komite sekolah menjalankan sebagaimana semestinya.

komite sekolah berfungsi sebagai memberi masukan, pertimbangan dan rekomendasi di sekolah. Fungsi ini sangat perlu dalam perkembangan pendidikan, di mana peranan komite sekolah terhadap hal ini dapat berjalan dengan semestinya, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik.

fungsi komite sekolah sebagai pengontrolan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan komite Sekolah sangat berperan dalam perkembangan sekolah, yakni harus transparans, akuntabel, dan demokratis, serta komposisi pengurusan dalam anggota harus mencakup semua unsur, untuk mencapai hasil yang maksimal.

Fungsi komite sekolah sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat dalam pembentukan komite Sekolah. Peranan ini Sangat perlu dilakukan melalui musyawarah mufakat yang diikuti oleh tokoh agama, tokoh masyarakat. Hal ini di perlukan agar dapat tercapai hubungan harmonis antara pemerintah dengan masyarakat.

Kerangka konseptual yaitu:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan khusus penelitian

a. Persepsi guru terhadap fungsi komite sekolah

1. Fungsi komite sekolah untuk mempertimbangkan pelaksanaan kebijakan

- a. Ketika ditanyakan tentang fungsi komite sekolah sebagai untuk mempertimbangkan pelaksanaan kebijaksanaan Bapak Drs. Amid Arifin menyatakan:

“selama saya sebagai guru di sini,saya melihat fungsi komite sekolah untuk mempertimbangan pelaksanaan kebijaksanaan dalam pembangunan dan perkembangan pendidikan, di mana komite sekolah berkerjasama dengan kami mencari solusi pemecahan masalah tersebut, kadang-kadang komite sekolah tidak tegas dalam mengambil sikap dalam mempertimbangkan pembangunan dan perkembangan pendidikan, sehingga kami berperan penuh dalam membantu mempertimbangkan dalam mengambil kebijaksanaan sekolah ”

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Asmarani, A.Md seorang guru IPS yang menyatakan (wawancara 16 November 2010)

“ Ibu melihat Fungsi komite sekolah untuk mempertimbangkan Pelaksanaan kebijaksanaan,di mana komite sekolah kurang mau mengikut sertakan kami majelis guru dalam mempertimbangan pelaksanaan kebijakan, sehingga udah pasti pembangunan dan perkembangan pendidikan tidak akan tercapai dengan baik ,tanpa kerjasama yang baik antara guru dengan komite ”

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Romui Eladi, S.Pd seorang guru IPA yang menyatakan (wawancara 16 November 2010)

“Selama Bapak sebagai guru di sini, saya melihat fungsi komite sekolah untuk mempertimbangkan pelaksanaan kebijaksanaan, oleh karena sebab saya selalu memberi motivasi dan dukungan penuh kepada komite sekolah dalam mempertimbangkan pelaksanaan kebijaksanaan di sekolah dalam masalah pembangunan dan perkembangan pendidikan, sehingga saya ikut serta dalam mencari solusinya ”

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Zubir, S.Pd seorang guru penjaskes yang menyatakan (wawancara 16 November 2010)

“ Bapak melihat fungsi komite sekolah untuk mempertimbangkan pelaksanaan kebijaksanaan, di mana komite sekolah selalu berkerjasama dengan kami, sehingga pemabangunan dapat tercapai ”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa komite sekolah selalu berkerjasama dalam mempertimbangkan pelaksanaan kebijakan di sekolah serta ikut campur semua yang terkait.

2. Fungsi komite sekolah dalam memberi masukan, pertimbangan dan rekomendasi

a. Ketika ditanyakan tentang Fungsi komite sekolah dalam memberi masukan, pertimbangan dan rekomendasi Mahdin, S.Pd Menyatakan:

“Selama Bapak di sini, saya melihat fungsi komite sekolah sebagai pemberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi, di mana komite sekolah memberi masukan tentang masalah dana mana bertujuan untuk pembangunan dan perkembangan pendidikan, sehingga saya ikut membantu komite sekolah ”

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Herlina Hudaída, S.Pd seorang guru

PKN yang menyatakan (wawancara 22 November 2010)

“Ibu selama ini melihat fungsi komite sekolah sebagai pemberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi, di mana komite sekolah, hanya memberi solusi dan rekomendasi masalah persoalan pembangunan dan

perkembangan pendidikan, sehingga masalah kesejahteraan guru kurang diperhatikan ”

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Nasrial,S.Pd seorang guru

Bahasa Inggris yang menyatakan (wawancara 22 November 2010)

“ selama sepengetahuan saya fungsi komite sekolah sebagai pemberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi, di mana komite sekolah selalu menjelaskan masalah personal dana di dapat dari donator dan serta pembukuan yang jelas, di mana dijelaskan dalam rapat”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi

komite sekolah sebagai memberi masukan,pertimbangan dan rekomendasi belum sepenuhnya berjalan dengan semestinya,

3. Fungsi komite sekolah dalam pengontrolan transparasi dan akuntabilitas

a. Ketika ditanyakan tentang Fungsi komite sekolah dalam pengontrolan transparasi dan akuntabilitas Mat Nor, S.Pd Menyatakan:

“selama kurang lebih 15 tahun saya mengajar di sini, saya melihat fungsi komite sekolah untuk pengontrolan transparasi dan akuntabilitas belum berjalan dengan baik, di mana sistem manajemen pengelolaan belum berjalan sebagai mana semestinya, sehingga pembangunan dan perkembnagan pendidikan agak terhambat”

Hal senada juga dikatakan oleh Agirman , S.Pd seorang guru matematika

yang menyatakan (wawancara 23 November 2010)

“ dari sepengetahuan saya, fungsi komite sekolah untuk pengontrolan transparasi dan akuntabilitas di sini hampir dikatakan belum begitu baik, di mana belum begitu transparan dalam masalah dana dari batuan operasional sekolah,sehingga Pembangunan dan perkembangan sekolah belum bias tercapai dengan baik”

Hal senada juga dikatakan oleh Rafi Afrisal , S.Pd seorang guru Bahasa Indonesia yang menyatakan (wawancara 23 November 2010)

“ Setahu saya, fungsi komite sekolah untuk pengontrolan transparansi dan akuntabilitas, udah di katakana baik, di mana penerimaan siswa baru transparan serta sesuai dengan daya tampung sekolah, sehingga tidak terjadi kesimpang siuran dalam masalah manajemen sekolah, maka sekolah menjadi termenajemen”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi komite sekolah dalam pengontrolan transparansi dan akuntabilitas agak baik.

4. Fungsi komite sekolah sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat.

a. Ketika ditanyakan tentang Fungsi komite sekolah untuk mediator antara pemerintah dengan masyarakat Bapak Surya, S.Pd Menyatakan:

“ Selama saya bertugas di sini, saya melihat fungsi komite sekolah untuk mediator antara pemerintah dengan masyarakat selalu mengikut sertakan tokoh masyarakat di mana pemerintah memberi masukan dan ikut mengontrol dalam pembangunan dan perkembangan sekolah, sehingga terwujud hubungan baik antara semua pihak”

Hal senada juga dikatakan oleh Jon Efendi, S.Pd seorang guru IPA yang menyatakan (wawancara 23 November 2010)

“Selama ini, saya melihat fungsi komite sekolah untuk mediator antara pemerintah dengan masyarakat. Saya mengamati hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam soal masalah pembangunan dan perkembangan pendidikan saling mendukung dan udah berjalan dengan baik”

Hal senada juga dikatakan oleh Kamel, S.Pd seorang guru penjaskes yang menyatakan (wawancara 23 November 2010)

“sepengetahuan saya, mulai dari Fungsi komite sekolah Mempertimbangkan pelaksanaan kebijaksanaan, penyediaan finansial, Mendorong pertumbuhan dan komitmen, memberi masukan, pertimbangan dan rekomendasi, pengontrolan transparansi dan akuntabilitas, mediator antara pemerintah dengan masyarakat tercapai dengan baik”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi komite sekolah sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat berjalan dengan semestinya ,

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan diatas diperoleh gambaran sebagai berikut :

Pertama, temuan penelitian tentang persepsi guru terhadap fungsi komite sekolah ternyata komite sekolah tidak bisa mengambil kebijaksanaan sendiri dalam mempertimbangkan pelaksanaan kebijakan di sekolah ikut campur guru, kepala sekolah dan masyarakat, karena komite sekolah saling ketergantungan satu sama lain, maka komite sekolah tidak bisa dengan sendirinya mengambil kebijaksanaan. Temuan tersebut dihasilkan dengan pendapat Sagala (2004) yang menyatakan bahwa “Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di

satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur sekolah, maupun luar sekolah”.

Kedua, temuan penelitian tentang persepsi guru terhadap fungsi komite sekolah sebagai memberi masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam proses pembentukan komite sekolah memang ada yang sudah sesuai harapan. Bahkan ada yang sudah menerapkan budaya manajemen dengan kreasi dan inovasi yang membanggakan, sehingga keberadaan komite sekolah benar-benar dirasakan peran dan fungsinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Temuan tersebut dihasilkan dengan pendapat tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/2002 Tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dinyatakan bahwa “Komite sekolah adalah badan mandiri, yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan” (Diknas, 2001).

Ketiga, temuan penelitian tentang persepsi guru terhadap fungsi komite sekolah sebagai pengontrolan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan komite Sekolah SMPN Gunung Kerinci Kecamatan Siulak ternyata dilakukan sesuai dengan prinsip yang berlaku, yakni harus transparansi, akuntabel, dan demokratis, serta komposisi pengurus dan anggota harus mencakup semua unsur, karena komite sekolah sebagai perwakilan dari masyarakat dalam pengelolaan sekolah. Temuan tersebut dihasilkan dengan pendapat (Sukiani, 2006). Menciptakan suasana dan

kondisi yang transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu

Keempat, temuan penelitian tentang Persepsi guru terhadap fungsi komite sekolah sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat dalam pembentukan komite Sekolah SMPN Gunung Kerinci Kecamatan Siulak dilakukan melalui musyawarah mufakat yang diikuti oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat Kecamatan Siulak. Perubahan nama BP3 menjadi komite Sekolah, khususnya di SMPN Gunung Kerinci tentu mempunyai peran tersendiri. Perubahan nama BP3 menjadi komite Sekolah adalah sebagai bentuk upaya pemerintah dalam melibatkan masyarakat sekitar dalam dunia pendidikan. Temuan tersebut dihasilkan dengan pendapat (Syamsudin, 2006). Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, sehingga komite sekolah sebagai lembaga atau wadah tempat berkumpul dan mengumpulkan ide dan aspirasinya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di SMPN Gunung Kerinci Kecamatan Siulak. Selain itu, pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta perbedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Komite Sekolah cukup membantu dalam membentuk jaringan kerja sekolah dengan lembaga pemerintah terutama dengan orang tua siswa. Komite Sekolah SMPN Gunung Kerinci cukup membantu sekolah dalam menunjang kelancaran proses pembelajaran di sekolah ini. Dari analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Persepsi guru terhadap Fungsi komite sekolah Pembentukan Komite sekolah di SMPN Gunung Kerinci Kecamatan Siulak telah sesuai dengan prinsip yang berlaku, yakni harus transparans, akuntabel, dan demokratis, serta komposisi pengurusan dan anggota harus mencakup semua unsur.
2. Persepsi guru terhadap fungsi komite sekolah di SMPN Gunung Kerinci belum berjalan baik. Di mana setiap kegiatan yang menyangkut pendidikan baik sarana dan prasarana Komite Sekolah selalu terlibat guru dan masyarakat.
3. Persepsi guru terhadap fungsi komite sekolah di SMPN Gunung Kerinci bermanfaat dalam membantu kegiatan belajar mengajar terutama dalam menyediakan media pembelajaran dan perlengkapan pendukung proses belajar mengajar.

2. Saran-Saran

Mengelola pendidikan memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi perlu waktu dan proses yang panjang. Di sinilah kinerja komite sekolah dipertaruhkan kepada masyarakat sebagai pemilik sejati pendidikan. Dalam upaya membangun kerjasama komite sekolah dengan guru dalam mendukung kegiatan belajar mengajar, peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Komposisi pengurus komite sekolah harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mekanisme kerjapun akan saling menunjang untuk memperoleh hasil yang maksimal.
2. Fungsi komite sekolah sebagai wadah penyaluran ide dan aspirasi masyarakat, seharusnya mampu memberi warna terhadap dunia pendidikan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Komite sekolah dalam membangun jaringan kerja perlu ditingkatkan demi terwujudnya mutu pendidikan yang diinginkan bersama. Upaya komite sekolah dalam membangun kerjasama perlu memperhatikan beberapa prinsip dan pendekatan, sehingga apa yang diinginkan dari program yang sudah dirancang berjalan lancar dan sesuai dengan keinginan komite sekolah dengan pihak yang diajak untuk kerjasama.
3. Keberadaan komite harus benar-benar diberdayakan di setiap sekolah. Jika organisasi komite sudah berjalan optimal sesuai fungsi dan perannya, ia akan benar-benar memberikan manfaat yang besar terhadap sekolah

4. Dalam upaya mengatasi kendala yang dihadapi, komite sekolah harus lebih intens melakukan tugasnya. Sebab kendala-kendala tersebut adalah mutlak adanya dan harus dievaluasi setiap waktu dan diselesaikan dan dicari akar permasalahannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002, ***Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi***, Jakarta:Rineka Cipta
-2006. ***Prosedur Penelitian***. Jakarta : PT Rineka Cipta
- BPS Kota Sungai Penuh,2010. ***Data Tentang Batas Administratif***.
- Diknas, 2001. ***Sarana dan Prasarana Serta Pengawasan KTSP***.
- Poerwadarmita, 1992, ***Kamus Lengkap Bahasa Indonesia***, Surabaya: Kartika.
- Indrawijaya, Adam. 1986,***Prilaku Organisasi***, Bandung: PT Sinar Baru.
- Mandalis, 2002 ***Metodologi Penelitian Kualitatif***, Jakarta :
- Moleong Lexy J, 1988, ***Metodologi Penelitian Kualitatif***, Bandung:Rosdakarya Offset.
-, 1990, ***Metodologi Penelitian Kualitatif***, Bandung:Rosdakarya Offset.
-, 2000, ***Metodologi Penelitian Kualitatif***, Bandung:Rosdakarya Offset.
- Mulyasa, 2003, ***Kurikulum Berbasis Kompetensi***, Bandung: PT Rosda Karya.
- Nasution, Sugiyono, 2005, ***Beberapa Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar***,Jakarta: Bina Aksara.
-, 2008, ***Beberapa Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar***,Jakarta: Bina Aksara.
- Pringgodigdo, Hanafi, 1997, ***Persepsi Dalam Mengajar*** , Jakarta: PT Rajawali.
- Rahmat, Jalaludin.2004 ***Psikologi Komonitas***. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya